

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayaran antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sarana transportasi dan komunikasi yang sangat diandalkan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara. Dalam hal fungsinya sebagai sarana transportasi, pelayaran antar pulau telah mampu menyeimbangkan perdagangan dan meningkatkan mobilitas penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya, sedangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi, pelayaran antar pulau dapat memungkinkan berlangsungnya pertukaran sosial budaya antar berbagai suku dan memungkinkan terselenggaranya hubungan pemerintah antara pusat dan daerah.

Hal tersebut sebenarnya tidaklah mengherankan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana terdiri dari kurang lebih 18.000 pulau besar dan kecil dengan garis pantai terluar yang mengelilinginya sepanjang 81.000 km dan menempati jalur silang yang amat strategis yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, yang berpenduduk 200 juta jiwa.*(id.wikipedia.org,2010)*

Pulau yang paling jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia adalah pulau Papua, yang terbagi 2 (dua) provinsi,yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Moda angkutan laut menjadi pilihan utama bagi masyarakat Papua dibandingkan dengan moda angkutan udara atau moda angkutan darat

dikarenakan daerah yang bergunung-gunung dan transportasi udara yang cenderung lebih mahal.

Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang laut tinggi, luasnya wilayah laut di Papua Barat ini menyebabkan wilayah ini memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Dari segi transportasi, perikanan, dan pariwisata banyak peluang yang dapat dikembangkan dari hal tersebut. Namun tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk berbagai jenis ikan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Potensi ikan yang tersedia dan tersebar di Laut Arafuru khususnya di perairan dekat Kabupaten Teluk Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana mencapai 799.566 ton, sedangkan yang baru dimanfaatkan sebanyak 273.756 ton atau baru mencapai 35,87 %. Pemanfaatan potensi bisnis kelautan merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Papua Barat bagian selatan yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat bagian utara. Permasalahannya, pengembangan komoditas kelautan ini berkaitan dengan investasi yang dibutuhkan untuk satu satuan usaha yang memerlukan dana yang sangat besar, sehingga tidak akan terjangkau oleh para petani/nelayan yang selama ini bergerak di bidang yang bersangkutan. Di samping permasalahan tersebut, prasarana yang tersedia, seperti pelabuhan dan prasarana transportasi masih minim, akibatnya komoditas yang dihasilkan sulit untuk menjangkau pasar.

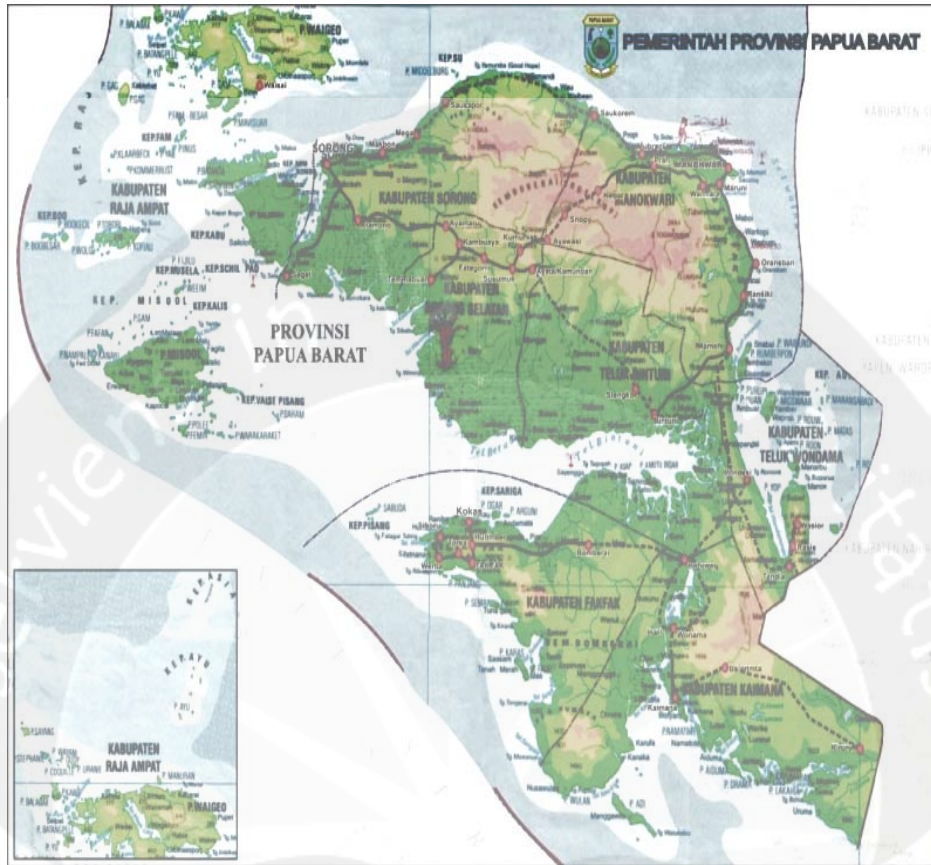
Teluk Bintuni adalah salah satu kawasan laut yang kaya akan hasil lautnya, Teluk Bintuni ini berada di kabupaten Bintuni, teluk ini dapat

menghubungkan antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Fak-Fak, hal ini dapat dijadikan suatu peluang di bidang transportasi dan perikanan.

Dalam konteks nasional, penetapan kawasan budidaya yang dinilai memiliki fungsi nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan. Pendefinisian nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Kawasan andalan terdiri dari kawasan andalan daratan dan kawasan andalan laut.

Khusus untuk Provinsi Papua Barat, daerah Raja Ampat dan Bintuni ditetapkan sebagai kawasan andalan laut dengan pengembangan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Bintuni yang menjadi kawasan andalan laut membutuhkan infrastruktur yang memadai, khususnya pada sektor pelabuhan. Pelabuhan Bintuni hanya memiliki satu pelabuhan saja, dengan panjang dermaga 70 meter. (*Masterplan Pengembangan Dermaga Pelabuhan Bintuni, 2004*), dengan berdasarkan dari Kabupaten Bintuni sebagai pusat pertumbuhan, maka diperlukan pengembangan dari sektor pelabuhan.



in andalan

Gambar 1.1. Lokasi Teluk Bintuni

1.2 Rumusan Masalah

Dengan letak yang cukup strategis tersebut kota Bintuni mempunyai kedudukan dan peran yang sangat potensial untuk menjadi titik bangkitan pengembangan dan simpul transportasi barang dan penumpang regional provinsi, disamping itu Bintuni adalah daerah pusat pertumbuhan di Kabupaten Teluk Bintuni. Saat ini, lalu lintas barang dan penumpang di distrik Bintuni menggunakan satu dermaga yang memiliki panjang dermaga 70 meter dengan

kondisi real aktivitas kepelabuhan yang sangat tinggi dengan menumpuknya kapal pada dermaga Bintuni.



Gambar 1.2. Kondisi Penumpukan Kapal di Pelabuhan Bintuni

Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan dermaga yang lebih representatif dan memadai untuk mendukung aktifitas transportasi dan ekonomi di Distrik Bintuni. Karena, bila pusat pertumbuhan memiliki sektor transportasi yang baik, maka proses perkembangan daerah tersebut akan menjadi lebih baik.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan alternatif solusi bagi pihak yang berkepentingan dalam mengatasi tingginya aktifitas kepelabuhanan di Pelabuhan Bintuni.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah di Pelabuhan Bintuni akibat tidak cukupnya daya tampung dermaga di Pelabuhan Bintuni yang hanya mampu menampung 2 kapal.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Dengan letak yang cukup strategis tersebut kota Bintuni mempunyai kedudukan dan peran yang sangat potensial untuk menjadi titik bangkitan pengembangan dan simpul transportasi barang dan penumpang regional provinsi Papua Barat di bagian selatan serta diharapkan mampu menjadi medan magnet bagi daerah sekitarnya yang meliputi Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini terutama ditunjang oleh letak geografis Kota Bintuni yang dibatasi oleh area perbukitan di sebelah utara dan sungai Steenkool di sebelah selatan yang memungkinkan Kota Bintuni untuk menjadi kota bahari dengan mengembangkan kegiatan kemaritiman. Tersedianya prasarana transportasi berupa pelabuhan memungkinkan untuk hubungan keluar, baik berupa pelayaran antar kota/antar pulau (pelayaran lokal), pelayaran nusantara, maupun pelayaran nelayan.

Berdasarkan analisis fungsi dan peran kota dengan mempertimbangkan potensi, masalah, peluang dan arahan pengembangan, maka visi pengembangan Kota Bintuni adalah mewujudkan Kota Bintuni sebagai pusat layanan regional di wilayah Teluk Bintuni dan pintu gerbang Provinsi Papua Barat yang didukung oleh fungsi-fungsi perkotaan yang mantap. Dengan perannya sebagai kota administratif yang didukung oleh kegiatan perdagangan, jasa dan transportasi diharapkan nantinya Kota Bintuni menjadi pusat pengumpulan dan distribusi barang serta modal yang masuk dari daerah-daerah belakangnya (*hinterland*), yang mencakup distrik-distrik di Kabupaten Teluk Bintuni di sebelah utara dan Kabupaten Teluk Wondama, serta menjadi kota tujuan. Dengan demikian, sarana-prasarana yang memadai akan mendukung terwujudnya visi kota Bintuni tersebut. Sebagai pusat pengembangan bagi daerah-daerah belakangnya, maka pengembangan dan peningkatan potensi Kota Bintuni harus dapat mendorong terjadinya pengembangan dan peningkatan *hinterland*-nya. Dengan demikian dalam proses pengembangan wilayah tersebut terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan antara pusat pengembangan (Kota Bintuni) dengan *hinterland*-nya.

1.5 Batasan Masalah

Lingkup penelitian yang dipelajari hanya pada penambahan panjang dermaga dan kebutuhan fasilitas dermaga. Sehingga penelitian ini dibatasi pada hal- hal berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada penambahan panjang dermaga.
2. Data karakteristik kapal yang dipakai adalah data keluar dan masuk kapal dari tahun 2001 hingga 2010.
3. Perkiraan jumlah arus kunjungan kapal dihitung untuk tahun 2015 dan tahun 2030.
4. Perkiraan jumlah arus penumpang dihitung untuk tahun 2015 dan tahun 2030